# JURNAL SIDANG MPR RI

**PENASEHAT**
Pimpinan MPR-RI
**PENANGGUNG JAWAB**
DR. C. Rahimullah, SH., M.Si
**PEMIMPIN UMUM**
Drs. Eddie Siregar, M.Si
**PEMIMPIN REDAKSI**
M. Rizal
**WAKIL PEMIMPIN REDAKSI**
Yana Indrawan
**REDAKTUR PELAKSANA**
Elis Murniaty, Suratno
**KOORDINATOR REPORTASE**
Rharas Esthining Palupi,
Adriansyah
**REDAKTUR FOTO**
Slamet Eko Suprayitno, Supriyanto
**REPORTER**
Euis Karmilah, Budi Muliawan,
Rosando, Sopiah,
Tengku Novan Muda Mulya,
Tri Hastuti, Rudy M. Gultom,
Jaka Sindu, Anggi Widia P
**FOTOGRAFER**
Ari Soeprapto, Sugeng,
Teddy Agusman, Wira,
Eka Hindra Sasmita, Supardy,
Mu'ammil Rokhily, Alief Ichwan,
Agung Sulistiono
**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**
Syamsul Bahri
**KOORDINATOR DISTRIBUSI**
Elly Triani
**STAF DISTRIBUSI**
Hadi Anwar Sani, Jajuni, Kusnani
**SEKRETARIS REDAKSI**
Ati Oktafia, Tri Sulistianingsih,
Fatmawati, Yenita Revi

**TIM AHLI**
Syahril Chili, Johni Yasrul,
M. Husen, Rini S. Danudjaja,
Ardi Winangun, Suroso P. Adrianto,
Iman Firdaus, Derry Irawan,
Mustafa Helmy, Budi Sucahyono,
Nurul Huda, Mauludi Rachman,
Rianzi Gautama.

**ALAMAT REDAKSI**
Bagian Pemberitaan & Hubungan
Antarlembaga, Biro Hubungan Masyarakat,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, Jakarta
Telp. (021) 57895050, 57895051
57895237, 57895238
Fax.. (021) 57895051, 57895237


## MUKADIMAH

# Pembentukan Anggota PAH

Sejak dilantik tanggal 3 Oktober lalu, pimpinan MPR telah memulai aktifitasnya. Penyampaian gagasan dan kinerja kepada masyarakat melalui televisi dan juga rapat-rapat kerja sudah dimulai. Agenda penting MPR terakhir ini adalah Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober hari ini serta pembentukan Panitia ad Hoc MPR, Senin, 19 Oktober kemarin.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden –insya Allah—akan berjalan mulus. Begitu juga Sidang Paripurna Pembentukan PAH yang cukup singkat menyetujui dan mensahkan nama-nama anggota PAH (Panitia Ad Hoc) dalam rapat yang dipimpin Ketua MPR Taufiq Kiemas, Senin kemarin. Taufiq didampingi empat wakil ketua dalam sidang yang dihadiri 406 anggota MPR itu.

Sesuai kesepakatan Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan Kelompok Anggota DPD pada 13 Oktober 2009, komposisi PAH terdiri dari 35 orang yang mencerminkan unsur DPR dan DPD secara proporsional. Dengan komposisi ssebagai berikut: Fraksi Partai Demokrat mendapat porsi paling banyak, 8 orang. Fraksi Partai Golkar 5 orang. Fraksi PDI Perjuangan 5 orang.

Selanjutnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 3 orang. Fraksi Partai Amanat Nasional 2 orang. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 2 orang. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2 orang. Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Hanura masing-masing 1 orang. Sedangkan Kelompok Anggota DPD sebanyak 7 orang. Sesuai hasil rapat gabungan, fraksi yang memiliki jatah satu orang, bisa mengusulkan satu orang lagi sebagai pengganti.

Berbeda dengan sejumlah fraksi di MPR, Kelompok Anggota DPD mengajukan dua tim anggota PAH. Tim pertama terdiri dari 7 orang menjadi anggota PAH untuk periode 19 Oktober 2009 sampai 18 Januari 2010, dan tim kedua juga terdiri dari 7 orang menjadi anggota PAH untuk periode 19 Januari sampai selesai.

PAH MPR akan melaksanakan tugasnya selama 6 bulan terhitung sejak Rapat Paripurna MPR (19 Oktober 2009) kemarin hingga tanggal 19 April 2010. PAH segera menggelar rapat untuk membahas persiapan penyempurnaan Tata Tertib MPR. Apabila sebelum tanggal 19 April PAH sudah menyelesaikan tugasnya, maka MPR akan menggelar sidang paripurna untuk mendengarkan laporan Panitia Ad Hoc dan mensahkan Tata Tertib MPR. "Penyempurnaan Tata Tertib MPR merupakan suatu keharusan karena Tatib yang ada sudah tidak sesuai dengan UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Untuk keperluan itu dibentuk Panitia Ad Hoc," kata Taufiq Kiemas.

Hal ini akan penting bahkan akan menjadi mata ujian pertama MPR dalam beradaptasi atau menyelaraskan langgam kerja sesuai tuntutan UU Nomor 27/2009 yang sempat membuat badai halus hubungan antara DPR dan DPD saat pembentukan pimpinan MPR hampir tiga pekan lalu. (BS)

# JURNAL SIDANG MPR-RI


**EDITORIAL** **Hal.**

- Optimisme dengan SBY ..... 3.

**LAPORAN UTAMA**

- MPR Sepakati Anggota PAH..... 4.
- Nama-nama Anggota Panitia Ad Hoc MPR..... 5.

**LIPUTAN**

- Imbauan Pimpinan MPR MPR dan Anggaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden..... 6.
- Tinggal Hari H-nya Saja..... 7.
- Lakukan Dengan Serius..... 8.
- Okky Asokawati : MPR Harus Menjadi Agen Perubahan..... 9.
- Ganjar Pranowo Pembahasan Tatib Selesai dalam Satu Bulan..... 9.

**SERBA SERBI**

- Panser dan Kendaraan Tempur di Gedung MPR..... 11.
- Luna Maya Ramaikan Acara Pelantikan Presiden..... 12.

**TOKOH HARI INI**

- Muhammad Asri Anas Wakil Ketua Fraksi DPD..... 13.

**OPINI**

- Menagih Janji Reformasi SBY..... 14.


**PENASEHAT** Pimpinan MPR-RI, **PENANGGUNG JAWAB** DR. C. Rahimullah, SH., M.Si, **PEMIMPIN UMUM** Drs. Eddie Siregar, M.Si **PEMIMPIN REDAKSI** M. Rizal, **WAKIL PEMIMPIN REDAKSI** Yana Indrawan **REDAKTUR PELAKSANA** Elis Murniaty, Suratno **KOORDINATOR REPORTASE** Rharas Esthining Palupi, Adriansyah, **REDAKTUR FOTO** Slamet Eko Suprayitno, Supriyanto **REPORTER** Euis Karmilah, Budi Muliawan, Rosando, Sopiah, Tengku Novan Muda Mulya, Tri Hastuti, Rudi M. Gultom, Jaka Sindu, Anggi Widia P, Suwarni, Bayu Setiadi, Suci Ati, Muammil Rokhily, Sugeng Irianto, Nita Juwita, Dian Arivani **FOTOGRAFER** Ari Soeprapto, Sugeng, Teddy Agusman, Wira, Eka Hindra Sasmita, Supardy, Iwan, Agung Sulistiono **PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI** Syamsul Bahri **KOORDINATOR DISTRIBUSI** Elly Triani **STAF DISTRIBUSI** Hadi Anwar Sani, Jajuni, Kusnani **SEKRETARIS REDAKSI** Ati Oktafia, Tri Sulistianingsih, Fatmawati, Yenita Revi **TIM AHLI** Syahril Chili, Johni Yasrul, M. Husen, Rini S. Danudjaja, Ardi Winangun, Suroso P. Adrianto, Iman Firdaus, Derry Irawan, Mustafa Helmy, Budi Sucahyono, Nurul Huda, Mauludi Rachman, Rianzi Gautama. **ALAMAT REDAKSI** Bagian Pemberitaan & Hubungan Antarlembaga, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR-RI Gedung Nusantara III, Lt. 5 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, JakartaTelp. (021) 57895050, 57895051, 57895237, 57895238 Fax. (021) 57895051, 57895237

# Optimisme dengan SBY

Hari ini kita mencatatkan sejarah kembali dilantiknya seorang presiden untuk kedua kalinya. Sejak almarhum Presiden Soeharto turun tahun 1998, belum pernah ada

Presiden yang tercatat terpilih kembali. Habibie gagal dipilih kembali. Megawati juga gagal terpilih kembali melalui Pemilu langsung tahun 2004.

Susilo Bambang Yudhoyono harus diakui fenomenal, karena ia presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, melawan *incumbent* Megawati, hingga putaran kedua. Kini, SBY kembali mencatat sejarah terpilih kembali secara langsung oleh rakyat mengalahkan saingan beratnya: Megawati dan Jusuf Kalla. Bahkan, sangat spektakuler, pasangan SBY-Boediyono menang telak dengan memperoleh suara 60%, sehingga Pemilu berlangsung satu putaran.

Lepas dari berbagai persoalan yang mungkin tak terselesaikan, menyangkut kinerja KPU dan lain sebagainya, namun tetap harus kita akui keunggulan SBY yang secara langsung diakui pemilihnya. Dengan didukung kesiapannya membentuk tim kampanye tangguh, tim komunikasi publik, iklan yang mengena, memilih partai koalisi yang tepat, dan kesiapan dana, berakhir dengan kemenangan itu.

Menjadi presiden tentu sangat berat. Mungkin, kenikmatan dan penghormatan yang diterimanya selama ini tidak atau belum sebanding dengan tanggungjawab yang diembannya. Apalagi, menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan pada sebuah negara yang masih memiliki sejuta masalah sejak krisis multi dimensi tahun 1997. Kemiskinan, tekanan global, korupsi, ketidakadilan, dan beberapa persoalan lain masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Pekerjaan berat memang masih menghadang Presiden SBY. Sejak tahun 2004 lalu, rakyat rasanya belum pernah melihat wajah cerah presidennya. Senyum SBY tak bisa lepas karena ia tahu tengah menanggung tanggungjawab yang besar yang tak bisa dihindari. Rakyat yang mati kelaparan menjadi tanggungjawabnya. Anak cerdas yang tak mampu melanjutkan kuliah, menjadi tanggungjawabnya.

Seorang berbakat tak bisa mengembangkan bakatnya dan tak bisa mengisi lowongan pekerjaan adalah tanggungjawabnya. Wanita tak sanggup melahirkan di RS dan seorang berpenyakitan memilih pasrah karena tak mampu berobat, adalah tanggungjawabnya. Merebaknya kejahatan, korupsi, dan lain sebagainya adalah tanggungjawabnya pula.

Limatahun lalu, mungkin SBY belum menunjukkan kinerjanya yang maksimal. Masih banyak gangguan yang membuat perjalanan kerjanya. Tapi, pada tahun pemerintahannya yang kedua ini, kita semua harus meletakkan harapan pada sang presiden untuk membangun Indonesia.

Kita harus optimistis. Kita tidak boleh pesimistis dan putus harapan. Kita harus percaya dan yakin bahwa Allah akan memberi petunjuk kepada para pemimpin kita untuk bekerja di jalan yang benar. Pesimis adalah dosa besar yang menganggap Tuhan tidak lagi Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hamba-Nya.

Sebaliknya, optimisme berpahala besar karena menganggap Allah Maha Memberi, Maha Penganugerah, Maha Kasih, Maha Penyayang, Maha Merahmati, dan lain sebagainya. Firman Allah dalam sebuah hadis qudsi; "Aku tergantung penilaian hamba-ku." Jika kita yakin dan menganggap Allah akan *melempangkan* jalan negara kita, niscaya Allah akan meluluskan harapan itu.

Suka atau tidak suka, kini SBY adalah presiden kita bersama yang wajib kita dukung untuk membawa Indonesia.

Harapan kita adalah kesejahteraan dan kejayaan bangsa. Marilah kita melangkah bersama. Bangun Indonesia dan kikis habis kemunafikan dan keserakahan. Kita dukung dan yakinkan SBY untuk mengikis borok-borok itu semua. (MH)

# MPR Sepakati Anggota PAH

**Jurnal MPR (20/10).** MPR menyetujui dan mensahkan nama-nama anggota PAH (Panitia Ad Hoc) dalam Rapat Paripurna MPR yang dipimpin Ketua MPR Taufiq Kiemas, di ruang rapat Gedung Nusantara, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Oktober kemarin.

Sidang paripurna yang dihadiri 406 anggota dengan agenda pembentukan PAH berjalan lancar. "Penyempurnaan Tata Tertib (Tatib) MPR merupakan suatu keharusan, karena Tatib yang ada sudah tidak sesuai dengan UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Untuk keperluan itu dibentuk Panitia Ad Hoc," kata Taufiq Kiemas yang didampingi Wakil Ketua MPR yang terdiri dari: Hj. Melani Leimena Suharli, Hajriyanto Y. Thohari, Lukman Hakim Saifuddin, dan Ahmad Farhan Hamid.

Sesuai hasil kesepakatan dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan Kelompok Anggota DPD pada 13 Oktober 2009, komposisi PAH terdiri dari 35 orang yang mencerminkan unsur DPR dan DPD secara proporsional.

Komposisi keanggotaan PAH (berdasarkan fraksi) adalah: Fraksi Partai Demokrat sebanyak 8 orang, Fraksi Partai Golkar 5 orang, Fraksi PDI Perjuangan 5 orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 3 orang.

Kemudian, Fraksi Partai Amanat Nasional 2 orang, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 2 orang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2 orang, Fraksi Partai Gerindra 1 orang, Fraksi Partai Hanura 1 orang, dan Kelompok Anggota DPD sebanyak 7 orang.

Sesuai dengan hasil Rapat Gabungan, fraksi yang jumlah anggota dalam PAH hanya diwakili satu orang, maka bisa menyampaikan satu orang lagi sebagai cadangan, bila anggota PAH dari fraksi itu berhalangan.

Berbeda dengan fraksi di MPR, Kelompok Anggota DPD mengajukan dua tim anggota PAH. Tim pertama terdiri dari 7 orang menjadi anggota PAH untuk periode 19 Oktober 2009 sampai dengan 18 Januari 2010, dan tim kedua juga terdiri dari 7 orang untuk anggota PAH periode 19 Januari sampai dengan selesai.

Selesai masing-masing fraksi dan Kelompok Anggota DPD menyampaikan nama-nama anggota dalam keanggotaan PAH, pimpinan sidang kemudian meminta persetujuan dari peserta sidang. Secara serentak terdengar suara: "Setuju..." Pimpinan sidang pun mengetuk palu, dan sahlah nama-nama anggota PAH tersebut.

Menurut Ketua MPR Taufiq Kiemas, PAH MPR ini melaksanakan tugasnya selama 6 bulan terhitung sejak 19 Oktober 2009 hingga tanggal 19 April 2010. Dan, PAH segera menggelar rapat untuk membahas persiapan penyempurnaan Tatib MPR.

Apabila sebelum tanggal 19 April Panitia Ad Hoc sudah menyelesaikan tugasnya maka MPR akan menggelar sidang paripurna untuk mendengarkan laporan Panitia Ad Hoc dan mensahkan Tata Tertib MPR. (Budi Sucahyo)

# Nama-nama anggota Panitia Ad Hoc MPR

**1. Fraksi Partai Demokrat :**
1. Ir. Agus Hermanto, MM
2. Sutjipto, SH, MKn
3. Angelina Patricia Pingkan Sondakh, SE
4. H. Yusyus Kuswandana, SH
5. Adiyaman Amir Saputra, SIP
6. Ruhut Poltak Sitompul, SH
7. Hj. Himmatul Alyah Setiawaty, SH, MH
8. Anton Sukartono Suratto

**2. Fraksi Partai Golkar :**
1. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, MSi
2. H. Syamsul Bachri S, MSc
3. Drs. Josef A. Nae Soi, MM
4. Dra.Hj. Chairun Nisa, MA
5. Dr. H. Harry Azhar Azis, MA

**3. Fraksi PDI Perjuangan :**
1. Dr. Yasona H. Laoly, SH, Msc
2. Dr. Ir. Arif Budimanta, MSc
3. Achmad Basarah
4. Ir. H. Daryatmo Mardiyanto
5. Syarif Bastaman, SH, MBA

**4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera :**
1. Drs. Al Muzzammil Yusuf
2. Dra. Yoyoh Yusroh
3. Ir. H. Yudi Widiana Adia, MSi

**5. Fraksi Partai Amanat Nasional :**
1. Ibrahim Sakty Batubara
2. Dra. Mardiana Indraswati

**6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan :**
1. Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz
2. Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi

**7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa :**
1. Dra. Hj. Ida Fauziyah

**8. Fraksi Partai Gerindra :**
1. Fary Djemi Francis
   Dhofir Farisi (Pengganti)

**9. Fraksi Partai Hanura :**
1. Dra. Hj. Soemintarsih Muntoro, MSi
   Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati (Pengganti)

**10. Kelompok Anggota DPD :**

Periode 19 Oktober 2009 – 18 Januari 2009
1. Drs. H. Wahidin Ismail
2. Prof. Dr. Jhon Pieris, SH, MS
3. Muh. Asri
4. Ir. Adhariani, SH, MH
5. H. Dani Anwar
6. Instiawati Ayus, SH, MH
7. Sultan Bakhtiar Najamudin

Periode 19 Januari 2009 – selesai
1. Ir. Marhany Victor Poly Pua
2. Ir. Abraham Liyanto
3. Elnino H. Husein Mohi, ST, MSi
4. Hj. Sri Kadarwati Aswin
5. Abdi Sumaithi
6. Ir. Anang Prihantoro
7. Alirman Sori, SH, MHum, MM

# Imbauan Pimpinan MPR dan Anggaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

**Jurnal MPR (20/10).** Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR dengan para Pimpinan Fraksi dan Kelompok Anggota DPD yang berlangsung 13 Oktober 2009 menyepakati untuk bersama-sama mensukseskan Sidang Paripurna MPR dengan agenda Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober, hari ini. Dan, mengimbau agar anggota MPR dari unsur DPR dan DPD hadir dalam acara tersebut.

Itu adalah salah satu kesepakatan yang dicapai dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan fraksi dan kelompok DPD di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta, Selasa (13/10).

Rapat gabungan itu dipimpin Ketua MPR Taufiq Kiemas didampingi para Wakil Ketua: Hajriyanto Y. Thohari, Melani Leimena Suharli, Lukman Hakim Saifudin, dan Ahmad Farhan Hamid.

Imbauan yang sama disampaikan Taufiq Kiemas ketika memimpin rapat paripurna MPR dengan agenda Pembentukan PAH, pada Senin kemarin (19/10). "Pada kesempatan ini diharapkan kehadiran seluruh anggota DPR dan DPD pada acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada pukul 10.00 WIB besok," katanya.

Imbauan itu diberikan, karena masih terdengar suara dari Kelompok Anggota DPD untuk tidak menghadiri acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2009-2014 terkait masih adanya masalah menyangkut kedudukan Ahmad Farhan Hamid sebagai wakil DPD dalam jajaran pimpinan MPR.

Pada konferensi pers usai Ragab, wartawan sempat menanyakan isu ketidakhadiran anggota DPD dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kepada Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari. Dalam Ragab, Hajriyanto menjelaskan, memang Kelompok Anggota DPD telah menyampaikan catatan-catatan yang sifatnya peringatan dalam proses pengambilan keputusan yang akan datang, namun tidak ada *statement* yang menyatakan ketidakhadiran DPD dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Rapat gabungan yang dipimpin oleh Ketua MPR Taufik Kiemas itu, selain membahas mengenai koordinasi persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, juga pembahasan mengenai Panitia Ad Hoc yang akan menyusun perubahan Tata Tertib MPR sesuai UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta membahas pelaksanaan Sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 dan TAP MPR.

Mengenai Sosisalisasi, menurut Hajiryanto, forum Ragab menyepakati perlunya penyempurnaan metode, waktu dan narasumber sosialisasi.

Terkait dengan anggaran pelaksanaan Sidang Paripurna MPR, dijelaskan oleh Hajriyanto bahwa anggarannya sangat minim, yakni tidak sebesar yang dianggarkan oleh KPU untuk acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp 1,2 miliar. Untuk pelaksanaan Sidang Paripurna MPR yang berlangsung dua hari (19 dan 20 Oktober 2009), anggarannya ditetapkan maksimal Rp 341 juta. (Novan/BS)

# Pimpinan MPR Sampaikan Undangan ke Presiden dan Wakil Presiden

**Jurnal MPR (20/10).** Satu persatu mobil Toyota Camry milik pimpinan MPR RI, pada pagi 16 Oktober, memasuki halaman rumah kediaman Ketua MPR RI Taufiq Kiemas di Jl. Teuku Umar, Jakarta Pusat. Ikut serta pula rombongan Sesjen MPR Rahimullah yang mengendarai sebuah bus.

Dari Teuku Umar, pimpinan MPR yang terdiri dari: Taufiq Kiemas (ketua), Lukman Hakim Saifuddin, Hajriyanto Y. Thohari, Melani Leimena Suharli (wakil ketua) menuju ke kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla di jalan Diponegoro, kemudian dilanjutkan ke Istana Presiden dan diakhiri menemui wakil persiden terpilih Budiono.

Pimpinan MPR beserta rombongan menemui ketiga pejabat itu dengan maksud menyampaikan undangan Sidang Paripurna MPR RI dengan agenda Pelantikan Presiden dan Wakil Peresiden terpilih yang acaranya berlangsung 20 Oktober 2009, hari ini.

Begitu tiba di kediaman Jusuf Kalla, wakil presiden periode 2004-2009, para pimpinan MPR langsung diterima oleh Jusuf Kalla. Ketika pertemuan baru berlangsung beberapa menit, Wakil Ketua MPR Achmad Farhan Hamid yang baru tiba di Jakarta dari luar kota langsung nimbrung dalam pertemuan tertutup itu.

Kepada pimpinan MPR, Jusuf Kalla menyatakan, menerima baik undangan itu dan menyampaikan kesediaannya untuk hadir dalam acara tersebut.

Dari kediaman Jusul Kalla, rombongan kemudian beranjak ke Istana Presiden, menemui Presiden RI periode 2004-2009, dan akan berlanjut 2009-2014. Seperti hal di kediaman Jusul Kalla, pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tertutup. Presiden SBY tampak antusias menerima pimpinan MPR dan rombongan.

Kepada puluhan wartawan yang mencegatnya usai bertemu Presiden SBY, Ketua MPR RI Taufiq Kiemas menyatakan, pimpinan MPR mengudang presiden pada acara pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2009 pukul 10.00 WIB.

"Kami sudah menyampaikan surat undangan itu," ujar Taufiq Kiemas, seraya menyatakan bahwa dulu undangan pelantikan hanya dikirim, namun tradisi itu sekarang diubah dengan diantar langsung ke tangan yang bersangkutan.

"Tadi undangan disampaikan langsung ke Pak Jusuf Kalla, sekarang ke Pak Presiden. Selanjutnya ke rumah Pak Budiono langsung *on hand*," kata Taufiq Kiemas.

Menurut Sesjen MPR Rahimullah, cara ini dalam istilah Jawa disebut dengan *toto kromo*." Disamping menyerahkan undangan juga untuk membicarakan masalah pelantikan itu sendiri," ujarnya.

Dengan bercanda Rahimullah mengatakan, saat ini musim hujan, bila diantar oleh caraka (ekspedisi, red) undangannya bisa basah. Dalam setiap pertemuan, baik dengan Jusuf Kalla, SBY, dan Budiono, mereka memberi merespon dengan baik dan menyatakan akan menghadiri acara itu.(Ardi Winangun)

## Tinggal Hari-H-nya Saja

**Jurnal MPR (20/10)**.Setelah menjalani gladi kotor, gladi bersih, dan gelar pasukan, Sesjen MPR RI Rahimullah mengatakan, pelaksanaan Sidang Paripurna MPR Periode 2009-2014 dengan agenda tunggal Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, siap dilaksanakan. "Persiapannya sudah 90%,"

ujarnya pada hari Ahad, 18 Oktober lalu.

Kesiapan yang dikatakan oleh Sesjen itu adalah mulai dari SDM (sumber daya manusia), peralatan, dan keamanan sudah dilakukan dengan terencana dan terkoordinasi dengan baik. Dari dalam sendiri ada 300 karyawan yang mem-*back up* acara itu.

Begitu pula koordinasi dengan instansi lain, seperti Paspampres dan Kepolisian juga sudah dilakukan. Tanggal 17 Oktober lalu, misalnya, dilakukan gelar pasukan yang melibatkan 2.000 personil.

Menurut Rahimullah, pasukan yang berjumlah 2.000 personil itu hanya yang berada di kompleks Gedung MPR, sementara di luar kompleks atau yang berada di lingkup Polda Metro Jaya mencapai 18.000 personil.

Keamanan mulai tampak diperketat sejak pukul 00.00 WIB atau 20 Oktober dini hari. Masyarakat yang boleh masuk ke kompleks gedung hanya yang memiliki kartu identitas khusus. Bagi yang tidak memiliki ID Card dan bisa menyaksikan acara ini televisi, karena acara ini diliput semua media, bahkan ada yang siaran langsung.

Menurut pria asal Bengkulu ini, pengamanan harus melibatkan banyak orang, sebab ini *event* besar. "Semua dunia tertuju kepada acara ini," ujarnya.

Sebab acara dihadiri langsung oleh 4 (empat) kepala negara dan kepala pemerintahan, yakni: Perdana Menteri Malaysia Tun Najib Razak, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Liong, Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, dan Sultan Brunai Hassanal Bolkiah, hadir.

Pengamanan tidak hanya ditunjukan kepada individu, namun buat semuanya. "Tidak hanya aman untuk yang bersidang, tetapi tapi aman untuk rakyat semua," ujarnya.

Untuk menjaga keamanan secara nasional, Presiden SBY saat bertemu pimpinan MPR menginstruksikan agar Kapolri melaksanakan keamanan secara menyeluruh. (Ardi Winangun)

## Selektif Dalam Pengamanan

**Jurnal MPR (20/10).** Beberapa hari ini di sekelilingi Gedung Nusantara nampak beberapa buah panser, *water canon*, tameng besi, pentungan, bahkan helikopter yang hilir mudik atau naik turun.

Menurut Kabag Pamdal MPR RI Riskandar, keberadaan alutsista itu hanya untuk mengantisipasi keadaan darurat.

"Hanya persiapan saja bila terjadi pada hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya. Ia memberi contoh, keadaan darurat itu bila ada demo anarkis, dan kalau itu terjadi maka panser atau *water canon* akan langsung turun.

Langkah pengamanan itu dilakukan untuk mensukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan di Gedung Nusantara pada 20 Oktober 2009, hari ini.

Menurut Riskandar, pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ini, mengerahkan kekuatan dua kali dari kekuatan saat pengamanan pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD. "Personilnya dua kali lipat dari jumlah yang kemarin," paparnya.

Disebutkan, jumlah pengamanan dari MPR sebanyak 30 personil yang di-*back up* Pamdal DPR sebanyak 400 personil, dan dari Paspampres berjumlah sekitar 800 personil.

Seperti biasanya, keamanan akan mulai dari Ring I sampai Ring IV. "Polisi yang berada di Ring II ada sekitar 300 orang," ungkapnya.

Keterlibatan polisi tidak hanya di sekitar kompleks Senayan, namun juga didukung oleh Polres dan Polsek se-Metro Jakarta.

Pengamanan yang ketat ini, selain disebabkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, juga karena dihadiri pula oleh sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara sahabat.

Untuk itu, persyaratan untuk memasuk komplek Gedung MPR pada hari itu dilakukan secara selektif. "Kami akan menginventarisir dan tidak setiap orang bisa masuk ke sini terutama Ring I," ujarnya.

Lebih lanjut Riskandar mengatakan, orang yang boleh masuk ke tempat acara pelantikan ini harus ada kaitannya dengan institusi, undangan, atau pekerjaan. (Ardi Winangun)

### Lakukan Dengan Serius

**Jurnal MPR (20/10)**. Untuk mensukseskan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2009-2014, pihak Setjen MPR sebagai panitia penyelenggara, berulang kali mengadakan gladi kotor dan gladi bersih prosesi acara itu.

Selaku penanggungjawab acara, Sesjen MPR Rahimullah mengatakan, kita melakukan acara gladi kotor dan gladi bersih proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. "Ini merupakan acara puncak Pilpres 2009," ujarnya.

Untuk itu Rahimullah mengharap agar dalam gladi kotor dan gladi bersih, pihak-pihak yang memerankan beberapa peran dalam proses acara itu melaksanakannya dengan serius. "Gladi kotor dan gladi bersih ini diikuti oleh instansi lain sehingga marilah kita lakukan secara serius," ujarnya.

Selanjutnya Rahimullah menjelaskan, Setjen MPR juga sudah mengecek alat-alat pendukung acara. Karena sebagai acara yang sakral, pihak Sekretariat Negara pun siap membantu *sound system*.

"Setelah dicoba *sound system*-nya cocok dan suaranya bagus, alat itu akan kita gunakan. Kalau kurang, ya kita gunakan milik kita sendiri," ujarnya saat gladi kotor.

Rahimullah selalu menekankan kepada semuanya agar melakukan gladi kotor dan bersih secara serius, sebab acara ini di samping dihadiri anggota MPR juga ada tamu-tamu kehormatan dari luar negeri yang hadir.

Tercatat beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan serta sejumlah utusan dari beberapa negara yang menghadiri acara ini, seperti Singapura, Malaysia, Australia, Timor Leste, Brunai Darussalam, Thailand, Korea Utara, Ceko, Amerika Serikat, Jepang, Filipina, dan Selandia Baru.

Dalam acara gladi bersih itu, Ketua MPR Taufiq Kiemas diperagakan oleh Dikarno, Lukman Hakim Saifuddin oleh Diastasita Widya Budi, Melani Leimena Suharli oleh Siti Fauziah, Achmad Farhan Hamid oleh Achmadi Rufriansyah, Hajriyanto Y. Thohari oleh Purwadi, Presiden SBY oleh Oni Arief Benyamin.

Sementara untuk Wapres Budiono diperagakan oleh Idi Supriyadi, dan Wapres Jusuf Kalla oleh Indra Ardianto. (Ardi Winangun)

### Menjamu Peserta Sidang dan Undangan

**Jurnal MPR (20/10).**Untuk mensukseskan Sidang Paripurna MPR pada tanggal 19 Oktober 2009 dengan agenda Pembentukan PAH untuk Perubahan Tata Tertib, dan tanggal 20 Oktober Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Setjen MPR RI telah melakukan berbagai persiapan, termasuk didalamnya pelayanan konsumsi.

Pelayanan konsumsi ditujukan untuk memberi layanan jamuan makan kepada peserta sidang (anggota MPR), para undangan, dan wartawan. Untuk jamuan makan ini pihak Setjen MPR menjalin kerjasama dengan perusahaan catering, PT. Jawa Tengah Boga.

Kerjasama dengan pihak luar, menurut Kabag Kepegawaian Ma'ruf Cahyono, karena banyaknya porsi yang dibutuhkan. Pada tanggal 19 Oktober misalnya, diperlukan 1000 porsi, dan pada tanggal 20 Oktober sebanyak 1500 porsi.

"Pada hari Selasa lebih banyak, karena undanganya juga lebih banyak daripada hari sebelumnya," ujarnya. Khusus untuk pimpinan MPR RI, penitia menyediakan konsumsi di ruang VIP, baik untuk tanggal 19 maupun 20 Oktober, berupa coffe break.

Menurut Ma'ruf Cahyono, menu untuk peserta sidang, pimpinan MPR, wartawan, dan undangan lainnya tidak ada perbedaan. "Porsi dan standar kualitasnya sama," ujarnya.

Artinya, semua bisa menikmati nasi timbel, sayur lodeh, bacem, empal, paru, lidah, tahu, tempe, sop kimlo, salad Bangkok, ayam rica-rica, gulai tengkleng, udang goreng tempura, lasagna, acar, krupuk, dessert, dan soft drink.

Apakah Presiden SBY, Wakil Presiden Boediono juga ikut makan? Pria asal Purwokerto itu menyatakan, biasanya presiden langsung pulang karena keterbatasan waktu. Meski demikian, bila presiden dan wakil presiden masuk ke ruang VIP, panitia akan menjamu yang bersangkutan dengan *coffee break*. "Itu pun kalau waktunya memungkinkan, kalau tidak biasanya langsung masuk ke ruang sidang," jelasnya.

Tapi Ma'ruf Cahyono punya keyakinan, porsi yang disediakan tidak akan kurang. "Jadi tidak perlu menggunakan kartu makan, karena sudah terseleksi lewat ring-ring pengamanan," jelas Ma'ruf Cahyono. (Ardi Winangun)

### Poppy Dharsono Harus Berpihak Kepada Rakyat

**Jurnal MPR (20/10).** Pembentukan PAH yang dimulai kemarin (19/10) memunculkan banyak harapan. Salah satunya datang dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Poppy Dharsono.

Anggota DPD wakil Jawa Tengah ini berharap banyak kepada kinerja PAH ke depan. "Harapan saya sebagai wakil rakyat yang digaji rakyat tentunya kerja maksimal. Jangan sampai menjadi bulan-bulanan. Dan itu harus ditunjukkan dengan kerja keras dan hasilnya harus dirasakan oleh rakyat," ungkap mantan model ternama ini.

Namun, ia mengingatkan bahwa anggota PAH yang terpilih harus diberikan waktu dulu untuk bekerja keras. Ia berharap bahwa PAH memiliki tim kerja yang baik dan kuat. "Meski intinya masalah tata tertib, tapi sekali lagi harapan saya kembali kepada asas keberpihakan kepada rakyat," tambahnya.

Poppy juga berharap, tumbuhnya semangat kritis terhadap kinerja MPR mendatang. Hal ini, menurut Poppy, disebabkan adanya kecenderungan tingkah laku mayoritas anggota MPR sekarang.

"Memang sekarang ada yang mayoritas. Tapi sebaiknya mereka berlaku kritis terhadap pekerjaan-pekerjaan mereka sendiri. Jangan sampai mayoritas itu bisa menghalalkan cara apapun, padahal itu bertentangan dengan rakyat," tambahnya.

Ketika disinggung mengenai tidak disebutkannya Ahmad Farhan Hamid, Wakil Ketua MPR mewakili DPD oleh jubir DPD dalam Sidang Paripurna MPR kemarin, Poppy menyatakan: "Saya kira harap dimengerti, hal tersebut terjadi ada hal yang sangat tidak enak dan tidak etis. Saya sangat menyayangkan hal ini dibiarkan," ucapnya. (Nurul Huda)

**Okky Asokawati**
**MPR Harus Menjadi Agen Perubahan**

**Jurnal MPR (20/10).** Ada harapan besar terhadap Panitia Ad Hoc (PAH) ke depan. Hal ini terlontar dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari DPR/ Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP) Okky Asokawati. Ia mengatakan bahwa panitia Ad Hoc yang terpilih agar bisa menelorkan ide, metodologi dan sistem yang mampu menunjang kerja MPR secara efektif.

Okky yang juga seorang psikolog ini menilai bahwa pada periode sebelumnya MPR bisa dikatakan tidak seberapa aktif. Namun ke depan diharapkan dengan kepemimpinan yang baru kinerja majelis bisa digerakkan lebih.

"Dan sesuai dengan kerja MPR untuk mensosialisaikan Udang-Undang Dasar (UUD) 1945, saya berharap panitia Ad Hoc ini benar-benar membuat metodologi, sistem dan lain sebagainya sehingga sosialisasi itu berjalan dengan baik," ujarnya.

Mantan model ini menambahkan bahwa anggota-anggota sendiri harus paham betul tentang UUD. Oleh sebab itu perlu dilakukan semacam pelatihan agar bisa melakukan sosialisasi UUD dengan baik.

"MPR harus mencermati perubahan secara global agar lembaga ini bisa menyesuaikan diri. Tidak hanya melakukan sosialisasi saja. Tetapi juga mencermati secara global sehingga bangsa kita bisa mengikuti perubahan itu. Mungkin para anggorta MPR sendiri bisa menjadi agen perubahan. Ia bisa memberdayakan masyarakat dan masyarakat bisa mengontrol kita," tegasnya.

Menurut Okky, peran krusial MPR ke depan adalah memperjelas tugas-tugasnya bersama dengan lembaga negara lainnya. Okky bahkan yakin masing-masing lembaga negara mempunyai tugas yang jelas, maka MPR tidak hanya seperti yang selama ini dipersepsikan orang. "Kalau hal ini bisa dilakukan maka lembaga negara ini eksistensinya sama semua," jelasnya.(Nurul Huda)

**Ibrahim Sakty Batubara, Ketua Fraksi PAN**
**Bersinergi Untuk Sukseskan Agenda MPR RI**

**Jurnal MPR (20/10).** Banyak hal yang harus dibenahi dan itu membutuhkan kerjasama dan korrdinasi yang kuat dari para anggota legislatif. Pasca pembentukan PAH MPR RI ini diharapkan semua elemen fraksi bersatu padu dalam rangka kinerja yang lebih baik hingga akhirya semuanya berpulang pada kesejahteraan rakyat.

"Ini harus dipupuk dan diusahakan agar semua menjadi nyata, agar terjalin kerjasama yang harmonis," ujar Ibrahim Sakty. Hal senada pun diutarakan Ibrahim pada saat menyampaikan daftar susunan anggota PAH dari Fraksi PAN, Senin (19/10). Kepada seluruh anggota majelis, dia mengharap dukungan dan kerjasama yang baik dari semua fraksi, tanpa itu pekerjaan akan terasa berat.

Secara lembaga dan fraksi Ibrahim berharap anggota MPR/DPR saat ini mampu memberikan perubahan ke arah yang lebih positif. PAH sudah terbentuk dan sepakat untuk mensukseskan Sidang Paripurna MPR dengan agenda tunggal Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober hari ini, maka semua fraksi harus bersinergi untuk itu. (Derry Irawan)

**Anna Mu'awanah**:
**Pembahasan di PAH Bisa Alot**

**Jurnal MPR (20/10).** Dari semangat dan nafas pembentukan PAH untuk menyelaraskan Tata Tertib MPR, mungkin akan sedikitterhadang. Pembahasan itu akan panjang dan lama. Sebab, PAH akan membahas lebih lanjut komposisi, mekanisme rapat, pembagian kerja, dan sebagainya.

"Memang, pembentukan PAH ini belum diketahui apa yang akan dilakukan. Kalau untuk mengamandemen Tata Tertib, bisa saja nanti membahas mengenai pembagian tata kerja atau tugas," kata Anna Mu'awanah, anggota MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), kepada Jurnal MPR, usai Rapat Paripurna MPR, Senin, 19 Oktober kemarin.

Sebagai sebuah Tata Tertib maka akan diatur mekanisme kerja dan kinerja MPR. Anna memberi contoh, usulan amandemen UUD NRI Tahun 1945, maka Tata Tertib itu akan mengatur mengenai cara pengusulannya, komposisinya, mengelola usulan amandemen tersebut, dan sebagainya. "Jadi itu sebagai bagian dari Tata Tertib MPR," ujarnya.

MPR Priode 2004-2009 lalu tidak dibentukn PAH, lanjut Anna. Sebaliknya, pada tahun 2009-2014 ini ada PAH. "Ini menunjukkan ada agenda yang harus dibahas dalam PAH," katanya. Agenda tersebut, misalnya, perubahan Tata Tertib yang langsung mengacu pada mekanisme usulan perubahan UUD 1945 dan sebagainya.

Karena itu, Anna Mu'awanah memperkirakan pembahasan di PAH nanti akan berlangsung alot. "Jika mengenai amandemen UUD 1945, tentu akan alot karena kerangkanya adalah ketata-negaraan, kebhinekatunggal-ikaan, dan Pancasila. Tidak bisa diubah itu," pungkasnya. (Budi Sucahyo)

**Harapkan Ketua MPR Jadi Ketua PAH**

**Jurnal MPR (20/10).** Anggota MPR dari unsur DPD Anang Prihantoro berharap, Ketua Panitia Ad Hoc MPR RI dapat dipegang langsung oleh Ketua MPR Taufiq Kiemas.

"Saya kira lebih baik dipegang Ketua MPR langsung, supaya koordinasinya lebih mudah," katanya seusai mengikuti Sidang Paripurna MPR RI Pembentukan Panitia Ad Hoc MPR RI di Gedung Nusantara Senin (19/10)

Menurut Anang, Ketua Panitia Ad Hoc belum ditentukan, sehingga belum ada keputusan siapa ketua dimaksud. Dikatakannya, tidak menutup kemungkinan ada nama lain, asal disepakati. "Kata kuncinya adalah kesepakatan bersama," tegasnya

Anggota DPD dari daerah Lampung ini menjelaskan, terkait dengan perwakilan dari DPD, dia mengaku tidak menghendaki penunjukkan orang-perorang, melainkan melalui prosedur serta mekanisme yang telah disepakati. "Tetap akan mengedepankan etika politik, itu sudah harus dibangun dari awal," tandas wakil rakyat yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu 2009

Anang optimistis ke 35 orang anggota Panitia Ad Hoc adalah orang-orang terbaik, mewakili masing-masing Fraksi dan DPD. "Kita mengharapkan mereka dapat segera merumuskan aturan main dan tata tertib dalam rangka kerja konstitusional ke depan," ujar Anggota DPD yang termasuk dalam Panitia Ad Hoc.

"Kalau orang yang terbaik kerja terbaik dalam waktu yang terbatas, menghasilkan keputusan yang terbaik, sebagai *rel* untuk kerja bersama 5 tahun ke depan," tambahnya

Anang mengaku, sebelumnya akan mempelajari apa yang telah dilakukan Panitia terdahulu, proses-proses yang sebagai acuan, termasuk dinamika serta kebutuhan yang berkembang, diantaranya kemungkinan atau peluang amandemen UUD 1945 yang komprehensif, tidak hanya sekedar berpikir DPD atau kepentingan siapapun tapi kepentingan bangsa dan Negara

"Amandemen komprehensif, yang tidak hanya mementingkan kepentingan kelompok. Misalnya tumpang tindih urusan ketatanegaraan. Yang penting fokus dan tujuan amandemen itu untuk menjawab kepentingan rakyat," kata Anggota DPD yang berambisi memuliakan kehidupan para petani.

Adapun beberapa nama perwakilan dari DPD telah disepakati pada Paripurna DPD sebelumnya yakni Drs. H. Wahidin Ismail, Prof. Dr. Jhon Pieris , Sh., Ms., Muh. Asri, Ir. Adhariani , Sh., Mh., H. Dani Anwar, Intsiawati Ayus , Sh., Mh., Sultan Bakhtiar Najamudin. (suwarni)

**Ganjar Pranowo**
**Pembahasan Tatib Selesai Dalam Satu Bulan**

**Jurnal MPR (20/10).** Anggota MPR RI Ganjar Pranowo (F-PDIP) menjelaskan bahwa Panitia Ad Hoc yang dibentuk MPR bertugas menyelesaikan tata tertib MPR. Ia menilai, hanya dalam waktu satu bulan tata

tertib dapat diselesaikan. Hal itu dikemukakannya usai Rapat Paripurna MPR yang dipimpin Ketua MPR Taufiq Kiemas di Gedung Nusantara, Senin (19/10).

"Sebulan menurut saya dapat selesai," katanya.

Menurut Ganjar, selain bertugas menyelesaikan tata tertib, ada tugas lain

yang juga tidak kalah penting yaitu sosialisasi Undang-Undang Dasar 1945.

"Kita harus membereskan tatib (tata tertib) untuk nanti dijadikan tatib bersama. Yang kedua soal sosialisasi Undang-Undang Dasar," katanya.

Menurut Ganjar, pimpinan MPR akan mengkoordinasikan Tim untuk melakukan sosialisasi UUD 1945. "Sehingga kita harapkan ada kemampuan yang sama dari seluruh Anggota MPR," ujarnya.

Lebih jauh Ganjar menjelaskan bahwa nantinya akan dibentuk tim kecil untuk menyusun metodologi dan substansi. "Agar tidak terjadi multi interpretasi. Kita kuatir betul kalau nanti masing-masing anggota MPR mengintepretasikan sendiri-sendiri akan bahaya," jelasnya.

Terkait dengan batas waktu kerja Panitia Ad Hoc yang hanya sampai bulan April 2010, Ganjar optimis tim akan mampu menyelesaikan tugas sebelum waktu yang ditentukan. "Dugaan saya, sebelum itu (waktu yang ditentukan) sudah akan selesai," katanya.

Menurut Ganjar, tatib yang akan dibahas Panitia Ad Hoc lebih cenderung kepada hal-hal teknis. "Yang sifatnya umum sudah masuk dalam Undang-Undang," ujarnya. (bs)

### Hairiah, Anggota DPD Kalbar Harus Perjuangkan Kepentingan Rakyat

**Jurnal MPR (20/10).** Kami mengharapkan kelompok anggota DPD yang duduk sebagai anggota Panitia Ad Hoc MPR dapat bekerjasama dengan anggota panitia Ad Hoc lainnya, terutama dalam memperjuangkan masalah-masalah daerah dan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan MPR.

Demikian harapan Hairiah, anggota DPD dari Kalimantan Barat, seusai Rapat Paripurna MPR dengan agenda Pembentukan Anggota Panitia Ad Hoc MPR di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (19/10).

Pada Sidang Paripurna MPR tersebut ditetapkan 7 (tujuh) anggota DPD menjadi Panitia Ad Hoc (PAH) MPR dan akan bekerja selama 6 (enam) bulan ke depan bersama anggota PAH dari unsur DPR.

Mengenai kriteria bagi anggota DPD yang ditetapkan menjadi anggota PAH, menurut pendiri YLBH Perempuan ini, secara internal tentu ada, terutama mengikuti mekanisme internal di DPD dan mewakili daerah masing-masing. "Karena mereka adalah putera puteri dari daerah, kriteria itu tentu sudah terakomodir pada diri mereka,"katanya.

Anggota Komnas Kalbar ini menambahkan, nama-nama yang direkomendasikan sesuai yang terpilih saat pengesahaan dalam rapat paripurna DPD. "Kami (anggota DPD lainnya) yang duduk di alat kelengkapan MPR sebagai Kelompok DPD tidak bisa intervensi, karena kami sudah mempercayakan kepada mereka," terangnya.

Menjawab pertanyaan Jurnal tentang yang akan diperjuangkan bagi masyarakat Kalimantan Barat, lulusan dari Universitas Tanjungpura menerangkan, salah satunya adalah meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. "Kalbar termasuk daerah yang cukup rentan, nomor 20, indeks perkapita, indeks *development*-nya sangat rendah, urutan ke-3 paling bawah di seluruh Indonesia," paparnya.

Dia menambahkan, potensi yang dapat dikembangkan di Kalbar yaitu dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada. "Masyarakat Kalbar harus bersama-sama mengelola SDM untuk kemakmuran masyarakat Kalbar", tambahnya. (sc)

### Tentang Tata Tertib

**Jurnal MPR (20/10).**Sidang Paripurna MPR RI telah membentuk Panitia Ad Hoc guna merumuskan Tata Tertib MPR RI . Anggota MPR RI daerah pemilihan Jawa Barat dari Fraksi Golongan Karya, Ferdiansyah, menjelaskan bahwa Tata Tertib MPR tidak termasuk dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD.

"Tata tertib MPR belum dibahas dalam UU MPR, DPR,dan DPD sehingga putusan-putusan yang dianggap penting perlu dilakukan perubahan," ujarnya usai mengikuti Sidang Paripurna MPR RI yang dipimpin Ketua MPR RI Taufik Kiemas (F-PDIP), didampingi Wakil Ketua Hajrianto (F-PG), Melani Leimina (F-PD), dan Ahmad Farhan Hamid (DPD), Senayan, Senin (19/10).

"Panitia Ad Hoc bertugas merumuskan dan menyusun tata tertib MPR," katanya.

Menurut Ferdi, panitia bertugas selama enam bulan terhitung saat ini dan berakhir pada 19 April 2010. Adapun nanti sebelum berakhirnya masa bakti Panitia Ad Hoc akan dilaksanakan sidang guna melaporkan pembahasan tata tertib yang telah disusun.

Berdasarkan komposisi jumlah anggota yang representatif di antara seluruh perwakilan fraksi dan DPD, Ia pun merasa yakin pembahasan Tata Tertib MPR RI dapat selesai dalam 6 bulan.(da)

### Pelantikan Presiden dan Wapres Menarik Para Peliput

**Jurnal MPR (20/19).** Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Periode 2009-2014 kali ini sangat menarik bagi kalangan media massa dan masyarakat. Dari sumber pemberitaan dan hubungan antarlembaga tercatat ada 86 media cetak nasional yang akan meliput peristiwa tersebut. Ke-86 media itu rata-rata menyertakan dua hingga empat orang sehingga tercatat ada 254 personil peliput dari total media cetak itu.

Sedang dari media elektronik, seperti radio, televisi, dan internet, tercatat: ada 12 stasiun radio, 22 stasiun televisi, dan 30 internet. Jumlah total personil 12 stasiun radio ada 30 personil ditambah 2 pendukung. Stasiun televisi tercatat 351 personil ditambah 211 pendukung. Sedang internet 30 personil ditambah 90 pendukung.

Acara pelantikan ini rupanya juga menarik media massa asing. Tercatat media cetak asing yang akan meliput mencapai 13 media yang melibatkan 35 personil. Lalu, 4 stasiun radio asing dengan total personil 6 orang. Sedangkan televisi ada 18 stasiun dengan total personil 81 orang ditambah dengan 11 orang pendukung. Sementara media internet 1 dengan 2 personil.

Total media massa nasional mencapai 150 buah dengan personil mencapai 958, dan pendukungnya mencapai 213 orang. Untuk media massa asing, secara keseluruhan mencapai 36 buah dengan personil mencapai 124 orang, dan pendukung 11 orang.

Kesempatan juga diberikan kepada perorangan atau organisasi yang hendak meliput acara ini sebagai peninjau. Jumlahnya sekitar 12 media dengan jumlah personil 12 orang. Sedangkan dari peliput organisasi ada 6 media dengan personil sebanyak 21 orang.

Secara keseluruhan media massa nasional dan asing ditambah peninjau, yang meliput acara ini sebanyak 204 media dengan total personil 1.339 orang.(Ardi Winangun)

### Panser dan Kendaraan Tempur di Gedung MPR RI

Jurnal MPR (20/10). Perhelatan besar pelantikan dan pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2009-2014 akhirnya diagendakan tunggal hari Selasa, (20/10) ini. Berbagai persiapan untuk mensukseskan kelancaran perhelatan besar negara yang menelan biaya Rp 350 juta ini telah dilakukan sejak jauh-jauh hari, terutama bidang pengamanan.

Pengamanan ini tidak main-main. Mengingat perhelatan ini akan dihadiri oleh banyak pejabat negara dan beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan. Kredibilitas negara sangat dipertaruhkan jika sedikit saja lengah. Apalagi mengingat kejadian-kejadian teror yang dilakukan teroris yang mengharu biru keamanan Indonesia belakangan ini, sangat membuat pihak pengamanan menjadi lebih serius dan lebih waspada.

Salah satu bukti keseriusan pengamanan ini terlihat hari Senin (19/10) kemarin di dalam lingkungan Gedung MPR/DPR RI yang berjejer 13 kendaraan lapis baja bersenjata lengkap dan panser siap tempur dioperasikan dalam rangka menjaga keamanan perhelatan besar hari ini. Seiring dengan makin dekatnya saat pelantikan presiden makin banyak fasilitas pengamanan yang dikerahkan oleh TNI dan Polri. (Derry Irawan)

### Rumpi Politik

Jurnal MPR (20/10). Selepas acara Sidang Paripurna MPR dengan agenda Pembentukan Panitia Ad Hoc MPR RI, beberapa anggota MPR RI saling berkelompok, bersalam-salaman, *say hello*, tetapi yang paling menarik adalah obrolan atau 'ngerumpi' politik antar anggota.

Di salah satu pojok ada kelompok obrolan Roy Suryo, Ruhut Sitompul dengan beberapa anggota lainnya. Di pojok yang lain ada Eko Patrio dan Tantowi Yahya dengan anggota lainnya. Dan masih banyak kelompok obrolan lagi. Kebanyakan obrolan mereka hanya sekitar basa-basi sederhana paling sering yang dibahas hanya menanyakan lokasi ruang kerja dan tentang komisi kerja DPR.

Dari beberapa kelompok obrolan yang ada, ada yang menarik perhatian yaitu obrolan antara Jero Wacik, mantan Menteri Kebudayaan dan Parwisata, dengan beberapa anggota MPR/DPR RI. Jero Wacik terlihat santai bercengkerama dengan Adjie Massaid, Angelina Sondakh dan pelawak H. Komar.

Angelina Sondakh dan Komar berulangkali dengan gaya canda menanyakan kepada Jero Wacik masalah lowongan menteri yang sedang santer dan apakah Jero Wacik ingin kembali menjadi menteri. Jero Wacik pun terlihat menjawab dengan santai: "Lihat saja nanti ya, he he he..."

Tapi ada yang lebih menyentuh, beberapa obrolan dari para anggota DPR yang menyangkut bencana yang menimpa rakyat dan bagaimana penanganannya saat ini. Juga soal pendidikan dan tentang kesejahteraan rakyat. Anggota Parlemen saat ini diharapkan tetap fokus bagi kesejahteraan rakyat, karena semua rakyat berharap lebih dari para anggota pilihan rakyat ini. (Derry Irawan)

### Booth Telkomsel Menjadi Pusat Info dan Saran

Jurnal MPR (20/10). Tepat di depan lobi Gedung Nusantara III, gerai Telkomsel hadir. Stand/booth ini dimaksudkan sebagai media informasi produk-produk dan layanan Telkomsel. Selain itu booth ini juga melayani saran-saran dan info teknis mengenai sesuatu tentang produk dan layanan Telkomsel.

"Banyak yang datang ke booth kami dari pengunjung ataupun anggota dewan. Kebanyakan menanyakan tentang layanan Telkomsel yang belum mereka ketahui, kami dengan senang hati memberikan info dan saran ataupun saran teknis kalau ada permasalahan dalam layanan Telkomsel," ujar Yoga Hermanto salah satu staf pameran Telkomsel.

Menurut dua SPG booth Telkomsel, Maria Margrit dan VE Getseveni, mereka sangat senang karena respon pengunjung sangatlah positif. "Tidak ada yang aneh-aneh dari pertanyaan dan permintaan mereka, kami pun akan dengan senang hati menjawab kalau mereka memang butuh saran kami mengenai layanan Telkomsel," kata Maria mewakili rekan-rekannya.

Maria ingat kejadian unik, saat itu ada seseorang yang datang ke booth Telkomsel dan mengatakan ingin menumpang duduk sambil menunggu seseorang. Orang itu sangat baik dan ramah. Para staf Telkomsel pun mempersilahkan orang itu duduk. Beberapa saat baru mereka menyadari jika tamu tersebut adalah AM.Fatwa, mantan Wakil Ketua MPR RI yang pada waktu itu masih menjabat.

"Ya intinya kita senanglah...dan berusaha memberikan bantuan kepada siapapun yang datang ke booth kita..," ujar Maria seraya terus memberikan senyum kepada pengunjung yang lewat. (Derry Irawan)

### Dari 13 Anak Hingga Pengantin Baru

Jurnal MPR (20/10). Rapat paripurna membahas tentang pembentukan Panitia Ad Hoc (PAH) berlangsung lancar. Seperti biasa disela-sela pembacaan ada saja yang membikin ger..... Acara yang dipimpin oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas itu hanya mengagendakan pembacaan masukan dari partai tentang wakilnya yang akan masuk dalam PAH.

Seperti biasa kesan kaku selalu muncul diawal acara. Namun ketika juru bicara PDI Perjuangan Panda Nababan menyampaikan usulan fraksinya suasana berubah agak cair. Terlebih, ketika ia menyebutkan nama-nama orang yang menjadi wakilnya, seperti biasa ia selalu nyeletuk. "Ini doktor beneran lho. Bukan doktor-doktoran. Ia ahli hukum," katanya.

Dan, seperti biasa, ketika mengakhiri usulan fraksinya, Panda tak lupa mengucapkan salam khas PDI Perjuangan: "Merdeka".

Suasana lebih cair lagi ketika giliran juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) maju kedepan. Ketika menyebut nama Yoyoh Yusroh, ia menggunakan istilah bunda. "Kenapa saya menyebut bunda, karena ia mempunyai putra 13 orang," seloroh jubir tadi.

Namun tidak hanya itu, jubir PKS ini membuat *joke-joke* lucu. Di akhir pidatonya ia mengucapkan kata Merdeka! "Ini khusus untuk pak Panda Nababan," teriaknya sambil berjalan bersalaman dengan yang bersangkutan.

Yang menarik lagi, ketika juru bicara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Martin Hutabarat membacakan usulan fraksinya. Sambil menyebutkan nama-nama yang bakal duduk di PAH, jubir Gerindra ini nyeletuk: "Untuk wakil yang

satu ini memang kelihatannya agak kusut. Maklum kemarin habis menikah. Jadi semalaman kerja keras," katanya sambil menunjuk Dhahir Farisi sang pengantin baru. Dhahir adalah menantu Gus Dur yang baru merayakan pesta pernikahan Ahad malam lalu di Sampoerna Strategic.

Yang menjadi tanda tanya ketika juru bicara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berbicara yang secara sengaja tidak menyebutkan nama Ahmad Farhan Hamid yang merupakan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Tapi, ketika usai menyerahkan daftar usulan anggota PAH ke pimpinan MPR, ia pun bersalaman dengan Farhan, dan disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin. (Nurul Huda)

### Jual Foto Diantar ke Rumah

**Jurnal MPR (20/10).** Di deretan anjungan yang berdiri di lobi Gedung Nusantara II, ada sebuah anjungan yang memamerkan foto-foto dengan bingkai besar, King Foto. Dalam bingkai ukuran besar yang dipajang itu terlihat foto Presiden SBY dan istri mengenakan busana khas Betawi. Pada bingkai lain tampak SBY dan seluruh anggota keluarga.

Tampaknya foto-foto tersebut sengaja dipajang, selain menyambut acara pelantikan Presiden, Selasa 20 Oktober hari ini, juga agar ada anggota MPR yang mampir untuk di foto. Atau, jika ada yang berminat memiliki koleksi foto presiden.

"Harga Rp 400 ribu, dengan frame ukuran 8 R," kata salah seorang perempuan yang menjaga anjungan itu. Bila foto sudah jadi, petugas akan mengantarnya ke rumah pemesan. Nah, Anda berminat? (Iman Firdaus)

### Luna Maya Ramaikan Acara Pelantikan Presiden

**Jurnal MPR (20/10).** Artis cantik Luna Maya hari ini (20/10) hadir di gedung MPR dalam acara: Dahsyatnya Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI. "Dahsyat" adalah program stasiun RCTI yang khusus mengemas acara musik. Namun, kali ini, akan berkolabroasi dengan berita yang disiarkan di lima lokasi yaitu: Gedung Nusantara III, Istana Negara, Studio 4 dan Studio 6, dan Lapangan Parkir Studio 4 RCTI.

Program ini akan ditayangkan dari pukul 07.30 hingga 11.30. Di Gedung Nusantara III, Luna akan didampingi penyanyi Afgan untuk memandu acara pelantikan presiden secara langsung.

Selain sajian musik tentu saja ada *talkshow* dan berita. "Dahsyat" kali ini juga akan diisi oleh penyanyi dan band-band yang sedang digandrungi masyarakat, seperti The Rock Indonesia, Mulan Jemeela, Melly Goeslaw, Saykoji, Netral, Cokelat, Zigaz, Ari Lasso, Pee Wee Gaskin, dan The Moon.

"Ini sebuah terobosan baru sehingga masyarakat dapat menikmati pelantikan presiden dan wakil presiden dengan lebih ringan," kata Direktur Programming RCTI, Hersiwi Achmad.

Bagi Luna, ini menjadi pengalaman pertama tampil bersama dalam acara pelantikan presiden. Gadis kelahiran Denpasar, Bali, 26 Agustus 1983 itu, tentu

saja tidak akan tampil seperti biasa yang penuh canda bersama lawan mainnya Raffi Ahmad dan Olga Saputra.

Dia tentu tak akan membawa-bawa monyet yang selalu mengganggu dalam tayangan iklan operator telepon seluler. (Iman Firdaus)

### Orang-orang Berjasa di Balik Pelantikan Presiden

**Jurnal MPR (20/10).** Gedung MPR/DPR RI tanggal 20 Oktober 2009 akan menggelar perhelatan akbar yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Tanggal tersebut merupakan hari bersejarah bagi segenap bangsa Indonesia, karena hari itu diadakan pelantikan Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden RI Boediono.

Sehari sebelum acara pelantikan tersebut diselenggarakan, tidak seperti biasanya tanda-tanda persiapan untuk menggelar perhelatan akbar itu sudah tampak di sana sini.

Tampak kesibukan yang luar biasa dalam gedung di kompleks Senayan itu. Seperti, di belakang Gedung Nusantara tempat dilangsungkannya pelantikan, beberapa OB Van dari berbagai stasiun televisi mempersiapkan peralatannya untuk dapat meliput langsung jalannya pelantikan esok hari.

Demikian juga jumlah wartawan yang memasuki gedung di kawasan MPR/DPR RI ini tampak meningkat jumlahnya.

Kesibukan itu juga tampak di lobi gedung Nusantara, tempat dimana Presiden dan Wakil Presiden akan melalui jalan tersebut. Beberapa petugas sedang menghias ruangan tersebut dengan berbagai rangkaian bunga-bunga yang indah. Alhasil, walaupun belum selesai dihias ruangan tersebut tampak indah dengan berbagai rangkaian disana sini.

Bukan saja petugas perangkai bunga, petugas gedung dan taman, petugas keamanan yang disibukkan dengan aktifitas persiapan pelantikan, namun petugas *cleaning service* pun juga disibukkan dengan pekerjaannya.

Bagaimana tidak, siang hari gedung Nusantara itu dipakai Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Ad Hoc MPR RI, dimana setelah itu dilanjutkan dengan makan siang.

Maka sudah menjadi kewajiban para *cleaning service* itu untuk membersihkan ruangan tersebut, karena esok harinya ruangan itu harus tampak bersih kembali.

Ternyata, kerja para *cleaning service* yang ada di Gedung Nusantara ini tidak berhenti sampai sore hari seperti jam kerja biasanya. Menurut salah seorang *cleaning service* yang bertugas dalam gedung itu, mereka berjumlah 25 orang bekerja di gedung Nusantara harus bermalam di situ. Karena para penghias bunga itu bekerja hingga malam hari. Jadi, mereka harus membersihkan kembali ruangan tersebut setelah selesai ruangan itu dihias.

Tidak tampak raut keberatan di wajah *cleaning service* itu. Bahkan dengan sumringah dia mengatakan: " Nggak apa-apa, nggak setiap hari ini, kan cuma lima tahun sekali.".

Tapi, saya ambil kue-kue ini untuk bekal nanti malam ya bu," tambahnya sambil mengambil beberapa potong kue dari meja prasmanan setelah selesai para anggota itu bersantap siang.

Permintaan yang sangat sederhana dari orang yang sederhana. Mereka rela meninggalkan keluarganya bermalam di gedung MPR/DPR ini demi suksesnya jalannya pelantikan.

Mungkin orang-orang dibelakang layar ini tidak begitu terlihat perannya, namun mereka adalah orang-orang yang juga ikut mensukseskan jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2009 – 2014. (Tuti)

# Muhammad Asri Anas
## Wakil Ketua Fraksi DPD

**Jurnal MPR (20/10)**.Rapat paripurna pembentukan Panitia Ad Hoc (PAH ) yang berlangsung Senin (19/10) kemarin di Gedung Nusantara berlangsung lancar. Satu persatu Ketua MPR RI terpilih periode 2009-2014 Taufiq Kiemas mempersilahkan para juru bicara fraksi-fraksi untuk menyampaikan daftar nama anggota yang masuk dalam PAH.

Tibalah saatnya kelompok DPD untuk menyampaikan laporannya. Muhammad Asri Anas Wakil Ketua Fraksi DPD MPR RI maju sebagai juru bicara. "Kami mengucapkan terima kasih atas waktunya pada kami kepada Ketua MPR RI Taufiq Kiemas, para Wakil Ketua saudara Hajriyanto Tohari, saudara Lukman Hakim Saefuddin dan ibu Melani Lemeina Suharli izinkan kami untuk...," sambutan Muhammad Asri.

Begitu Muhammad Asri ingin melanjutkan kata sambutannya, tiba-tiba terdengar ramai celetukan-celetukan dari sebagian besar anggota MPR RI dan pengunjung. Mereka mengira juru bicara DPD itu terlupa atau malah sengaja tidak menyebutkan nama Ahmad Farhan Hamid sebagai salah satu dari empat Wakil Ketua MPR RI.

Prediksi sebagian anggota MPR dan pengunjung terbukti, Muhammad Asri Anas menjelaskan mengapa ia tidak menyebut nama Farhan Hamid sebagai Wakil Ketua MPR. "Saya mewakili DPD memang sengaja tidak menyebutkan nama Farhan Hamid sebagai Wakil Ketua MPR RI sebagai bentuk protes bahwa kami tidak pernah mengakui saudara Farhan sebagai wakil DPD di pimpinan MPR. Sampai kapan pun sebelum ada perubahan di unsur pimpinan kami tidak akan mengakui keberadaan saudara Farhan itu sebagai wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD," jelas Muhammad Asri Anas.

Lebih jauh Muhammad Asri Anas mengatakan, semua yang ia lakukan itu adalah hasil keputusan rapat DPD RI. Artinya secara keseluruhan adalah hasil keputusan DPD RI. Mengenai masih adanya suara-suara sumbang yang masih berkeliaran, Muhammad Asri menyebutkan mereka adalah pihak yang tidak punya komitmen. "Intinya, kami memperjuangkan hasil keputusan rapat DPD hasilnya bulat tidak mengakui saudara Farhan," tandas Muhammad Asri Anas.

Lantas mengapa sang juru bicara DPD ini kemudian menyalami Farhan Hamid saat menyerahkan daftar anggota PAH DPD ke Ketua MPR. Muhammad Asri Anas berkilah bahwa itu hanyalah sisi manusiawi yang tidak menolak orang yang mengajak bersalaman.

"Saya menyalami dia karena unsur kemanusiaan saja, buat saya hubungan antarsesama manusia tetap dijaga, kultur kita kan begitu. Tetapi secara kelembagaan tidak mungkin kami mengakui Farhan, menyalami itu adalah soal manusiawi ya...masa orang ajak bersalaman saya tidak bersalaman..saya hanya tidak suka dengan beliau karena melanggar aturan di internal DPD itu saja," imbuh Muhammad Asri Anas.

Berbicara tentang apa yang akan dipersiapkan DPD sebagai kiprahnya di PAH MPR RI, anggota PAH MPR RI ini mengatakan, buat DPD yang memasukkan tujuh anggotanya dalam PAH akan bekerjasama dengan fraksi lain untuk memaksimalkan kinerja Majelis. "Kami akan memperjuangkan suatu perubahan dulu, ada beberapa pasal yang harus diubah, pasal-pasal ini harus diubah, karena menurut saya ada beberapa pasal yang saya pikir itulah yang dimanfaatkan Farhan. Kalau perubahan pasal-pasal ini bisa dilakukan saya pikir keberadaan beliau (Farhan) bisalah kita anulir, dan kemudian Dewan Kehormatan bisa menjalankan tugas untuk langsung memberi sanksi kepadanya," tandas Muhammad Asri, anggota DPD dari daerah Sulawesi Barat.

Tentang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober, Wakil Ketua DPD RI ini tidak bisa menjamin apakah anggota DPD lainnya akan hadir pada saat pelantikan. "Yang pasti Rapat Paripurna kita menyepakati pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan dilakukan besok (20/11). Kami berharap diberikan penghargaan dan apresiasi kepada teman-teman yang karena urusan keberadaan Farhan Hamid tidak selesai, kemudian pada saat pelantikan ada yang tidak hadir atau melakukan interupsi," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, urusan pelantikan Presiden adalah hak masing-masing.dan tidak bisa dibatasi. Kami harap tidak ada penekanan-penekanan dari rapat paripurna dan dari pimpinan tentang sikap kami ini," ujar Muhammad Asri

Lepas dari itu, unsur DPD, menurutnya, sangat menghormati sang presiden terpilih. Terpilihnya SBY dua kali adalah pengakuan luar biasa dari rakyat. "Tetapi untuk kinerja beliau lima tahun kedepan kan masih panjang. Perjalanan ini dan saya sendiri siap memberikan koreksi apa pun jika ada kesalahan-kesalahan dalam periode kedua beliau. Tentu sesuai dengan tugas-tugas saya sebagai anggota DPD dan MPR RI saya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja beliau selama lima tahun kedepan," tandas Muhammad Anas mantap. (Derry Irawan)

**Ir. H. Zulfadhli**
Anggota MPR Fraksi Partai Golkar dan Ketua DPD Golkar Kalimantan Barat

# Menagih Janji Reformasi Birokrasi SBY

Harapan masyarakat terhadap pimpinan SBY-Boediono ini cukup besar. Sebelumnya dia sudah mengumbar janji. Saya mencatat ada 15 janji yang pernah dia lontarkan. Salah satunya akan melanjutkan reformasi birokrasi. Ini menarik sekali karena ini merupakan program sebelumnya.

Namun, faktanya, reformasi birokrasi masih jauh dari harapan publik. Jadi sangat wajar bila publik berharap besar pada periode ini untuk melanjutkan reformasi birokrasi. Bahkan menjadikan agenda ini sebagai agenda utama dalam 'Program 100 hari'.

Reformasi birokrasi merupakan entry point, pintu masuk, dalam rangka memutus rantai KKN. Jadi, kita jangan bicara memutus rantai KKN bila tidak melakukan reformasi birokrasi. Inilah yang menjadi bukti komitmen pemerintah untuk menjadikan pemerintah yang akuntable dan transparan.

Masyarakat menganggap sekarang ini dirinya masih menjadi korban patologi birokrasi diberbagai tingkatan. Contoh, masalah pengurusan KTP, akta kelahiran, itu masih belum mudah, belum cepat. Ini akibat adanya budaya ketertutupan struktur birokrasi yang masih tebal.

Keberhasilan 5 tahun yang lalu hanya kulit luarnya saja, seperti perampingan struktur-jabatan-eselon, baru itu itu yang nampak. Tetapi perubahan perilaku dari birokrasi masih sangat lemah.

Kita harus mengambil pelajaran dari negara maju, seperti Jepang, Korea Selatan, dan China. Mereka di awal kebangkitannya menempatkan reformasi birokrasi sebagai prioritas. Prioritas dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga kita lihat negara-negara itu maju pesat.

Sebenarnya, amanah UU. No. 14 tahun 2008, itu sangat bagus menjadi pedoman. UU itu sangat memberi ruang partisipasi publik termasuk hak dan kewajiban pemerintah, badan hukum negara untuk melaksanakan asas-asas keterbukaan informasi.

Salah satu contohnya, seluruh badan publik didesak untuk melakukan berbagai persiapan yang cermat dalam memberikan pelayanan informasi publik yang akurat, mudah, cepat, murah, dan bermanfaat. Hal inilah yang sebenarnya menjadi kunci reformasi birokrasi.

Kalau SBY konsisten dan cepat melaksanakan amanah UU, itu merupakan sebuah bentuk awal yang baik dalam rangka komitmen SBY dalam melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi harus diawali dari pemerintahan yang berada di bawah kendali SBY-Boediono. Mulai dari departemen sampai tingkatan yang paling bawah, provinsi, kabupaten/kota. Ini kan masih satu rentang kendali di bawah SBY. Dan itu harus komprehensif, tidak hanya fokus pada pemerintah pusat dan hanya pada departemen tertentu. Reformasi birokrasi ini harus cepat apalagi terkait dengan pelayanan publik. (Ardi Winangun)